

GUNTINGAN BERITA

| CODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|----------|
| MIGAS | NERACA | 1 | 15-8-'02 |

Indonesia akan Kirim Tim ke Cina untuk Bahas Pasokan LNG ke Fujian

Jakarta, NERACA

Pemerintah Indonesia pada hari Minggu (18/8) akan berangkatkan sebuah tim ke Cina untuk menindaklanjuti tawaran Pemerintah Cina agar Indonesia memasok 2,5 juta ton *liquefied natural gas* (LNG)/tahun ke Fujian. Tim ini membawa misi menyampaikan jawaban dari Presiden Indonesia atas tawaran tersebut, sekaligus merinci hal-hwal yang berkaitan dengan pengiriman LNG, termasuk legal kontrak.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/8), Vice Presiden Government & Public Affairs Beyond Petroleum (BP) Indonesia, Satya Widya Yudha mengungkapkan, tim itu terdiri atas Direktorat Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, dan BP Indonesia selaku mitra Pertamina dalam memproduksi LNG. Dia pun kemungkinan ikut dalam rombongan itu.

Menurut Satya, berbeda dengan Australia yang sudah memenangkan tender pengadaan LNG untuk Guangdong, Indonesia yang diberi kesempatan memasok LNG ke Fujian dengan penunjukan langsung (tanpa tender) perlu membicarakan lebih lanjut untuk merinci

berbagai masalah yang membutuhkan pendalaman.

"Jadwal pengiriman tahun 2006, misalnya, harus dibicarakan secara detil. Begitu juga harga, walau sesungguhnya sudah *deal done*, tetap perlu dibicarakan lagi. Bagaimanapun, jelas ada perbedaan antara Guangdong dan Fujian, baik dari sisi jarak maupun volume kontrak," kata Satya yang tanpa sengaja bertemu pers dalam acara silaturahmi wartawan pertambangan dengan Deputi Badan Pelaksana (BP) Migas Bidang Umum, Bangun Usman Harahap, di sebuah rumah makan di Jakarta Pusat.

Berkaitan dengan pemberitaan yang menyebutkan seolah-olah Indonesia setengah hati menerima tawaran dari pemerintah Cina itu, Satya sangat menyayangkan munculnya pemberitaan seperti itu. Padahal yang sesungguhnya, Indonesia sangat serius menerima tawaran itu karena merupakan peluang dan awal yang sangat baik untuk pengembangan pertama kilang LNG Tangguh di Irian Jaya.

"Untuk tahap pertama, kita berencana membangun dua *train* dengan kapasitas masing-masing 3 juta ton. Walaupun sampai saat ini order yang ada baru 3,8 juta ton/

tahun (Fujian dan Filipina), dalam perkembangannya nanti, BP dan Pertamina akan berupaya mencari peluang ke pasar tradisional, seperti Taiwan dan Jepang, atau ke kawasan Asia Tenggara lainnya di luar Filipina. Di Cina sendiri, masih ada peluang memperbesar pasar karena pertumbuhan konsumsi LNG di Cina tinggi," kata Satya.

Dia menegaskan, adalah keliru jika BP Indonesia menolak tawaran Cina yang prospektif itu. "Makanya kita harus segera ke sana, memberikan respons kesungguhan kita. Terus terang, langkah sedikit saja, produsen lain siap menyodok. Pasar LNG memang ketat, tak mudah mencari peluang pasar, apalagi pasar baru," kata Satya.

Seperti diberitakan, Indonesia kalah dalam tender pengadaan LNG 3 juta ton/tahun di Guangdong, Cina, meski sebelumnya Indonesia optimistis bakal memenangkan tender itu. Meski kalah, Indonesia masih diberi kesempatan oleh pemerintah Cina untuk memasok LNG ke Fujian sejumlah 2,5 juta ton/tahun. Satya tidak tahu alasan Cina memberikan kesempatan kepada Indonesia. Tapi dia mengakui bahwa bisnis migas BP di Cina termasuk *the biggest*. (31)

GUNTINGAN BERITA

| KODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|----------|
| MIGAS | SUARA KARYA | 1 | 15-8-'02 |

Indonesia Serius Garap Pemasokan LNG Ke Fujian

JAKARTA (Suara Karya): Tim negosiasi Indonesia, Senin pekan depan bertolak ke Cina guna menindaklanjuti hasil penawaran pasok gas alam cair (LNG) ke Fujian (Cina) sebanyak 2,5 juta ton per tahun yang dimenangkan Indonesia. Vice President and Public Government British Petroleum Indonesia, Satya W Yudha, dalam percakapan dengan wartawan di Jakarta, kemarin, mengatakan, keputusan mengirim tim negosiasi itu merupakan bukti keseriusan Indonesia mengambil penawaran untuk memasok LNG ke Fujian.

"Indonesia pasti mengambil penawaran yang telah dimenangkan itu karena memang tidak mungkin ditolak mengingat pasar LNG dunia kini mengalami kelebihan pasok," kata Satya.

Selama di Cina, tim negosiasi akan membicarakan masalah pasokan itu lebih lanjut dengan tim Cina. Pembicaraan itu sendiri, kata Satya, patut segera ditindaklanjuti karena penawaran LNG ke Fujian ini belum memiliki ikatan hukum. Hasil pembicaraan tim negosiasi itu, ujarnya pula, diharapkan membuat pasokan LNG ke Fujian dapat dimulai pada 2006.

Satya juga menepis keraguan beberapa kalangan bahwa pasokan LNG ke Fujian baru sekadar pernyataan pemerintah Cina dan bukan merupakan kesepakatan Pemda Fujian sendiri. "Tidak benar itu. Yang melakukan penawaran (pasok LNG) itu adalah pemerintah Cina melalui surat PM Zurong Ji kepada Presiden Megawati secara langsung. Jadi, (itu terutang) resmi (dalam bentuk) surat dari pemerintah kepada pemerintah," paparnya.

Melalui keikutsertaan dalam tender, Indonesia sebenarnya juga mengincar hak pasok LNG ke Ghuangdong yang mencapai 3 juta ton per tahun. Namun begitu hasil tender diumumkan pada 8 Agustus lalu, hak pasok LNG ke Ghuangdong ini dimenangkan Australia. Meski demikian, Indonesia merasa tak perlu kecewa karena masih memenangkan hak pasok LNG ke Fujian. (D-1)

GUNTINGAN BERITA

| DE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 71948 | Berita Buana | 6 | 14-8-2002 |

Soal Kekalahan Indonesia dalam Tender LNG Guangdong

BP Ditengarai Sengaja Pilih Australia

Jakarta, Buana

Kekalahan Indonesia dari Australia dalam tender proyek pasok gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) senilai 13 miliar dolar AS ke Guangdong, Cina ditengarai akibat "permainan" Beyond Petroleum (BP) Indonesia. Dengan keberadaan BP di dua kubu yang bersaing, maka kerahasiaan masalah harga penawaran menjadi terbuka.

"Kekalahan Indonesia ini bisa jadi merupakan skenario yang memang sudah disusun oleh BP Indonesia untuk memenangkan Australia," kata pengamat ekonomi UGM, Revrison Baswir kepada *Buana* di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Revrison asumsi tersebut bukan tidak beralasan. Pasalnya, BP berpijak di dua kaki, satu kaki di Indonesia lewat BP Indonesia — yang mengelola ladang Tangguh bersama Pertamina — dan kaki satunya lagi berada di Australia lewat konsorsium North West Shelf.

Bagi Indonesia, masalah ini perlu diteliti dan tidak bisa didiamkan begitu saja. Alasannya, dalam bisnis ada praktik *power game*, di mana dalam hal ini BP memainkan peran ambivalen untuk bisa memenangkan konsorsiumnya yang ada di Australia.

"Sekarang logikanya begini, Australia menawarkan harga, Indonesia juga menawarkan harga, di mana di dalamnya BP juga ikut. Apa bisa kita jamin kalau BP tidak membocorkan harga kita terhadap konsorsium BP di Australia. Siapa yang tahu," tambah Revrison.

Untuk itu, Revrison minta pemerintah harus berhati-hati dalam menggarap proyek-proyek LNG maupun proyek migas lainnya di masa mendatang. Jangan lagi Indonesia bersaing memperebutkan proyek raksasa di mana dalam persaingan itu terdapat kubu yang sama, seperti keberadaan BP di Tangguh dan keberadaan BP di Australia.

"Kegagalan ini harus membuat kita mawas diri karena ini bisa jadi

preseden buruk bahwa kita bisa dibohongi dengan skenario. Kita juga harus tahu, ada yang disebut dengan intelijen ekonomi dan Indonesia kalah di sini," papar Revrison.

BP Bantah

Menghadapi tudingan keras yang bisa berakibat buruk itu, *Vice President* BP Indonesia, Satya W Yudha langsung membantah. Menurutnya, tidak mungkin BP melakukan hal itu karena pihak BP pusat di Inggris sudah memberikan garansi kepada pemerintah Indonesia.

Menurut Satya, dalam pertemuan Presiden Megawati dengan *Chairman* BP di London beberapa waktu lalu telah disepakati bahwa BP akan memprioritaskan Indonesia dalam tender proyek Tangguh ini. "Kita tidak pernah berpikir kalau kemenangan Australia tersebut merupakan rekayasa. Ini karena sudah ada *decision* dari *Chairman* BP untuk memprioritaskan Indonesia dalam tender ini," kata Satya kepada *Buana*, Selasa (13/8).

Bahkan Satya mencoba menjelaskan alasan ketidakmungkinan BP memainkan skenario untuk memenangkan konsorsium North West Shelf.

Menurutnya, saham BP Indonesia di Tangguh mencapai 49,86%, sementara di konsorsium North West Shelf hanya seperenam saja.

"Kami semua yang ada di BP ini, mulai dari *chairman* di luar negeri hingga pengambil keputusan yang ada di Indonesia, sejak semula telah menyepakati untuk memperjuangkan Tangguh," ungkap Satya.

Seperti diketahui, konsorsium North West terdiri dari lima pemain migas dunia, yakni Woodside Petroleum, Royal Dutch/Shell Group, Chevron Texaco Corp., BHP Billiton, BP dan Japan Australia LNG — patungan antara Mitsubishi Corp. dan Mitsui & Co., Jepang.

Lebih Cepat

Namun kecurigaan bocornya informasi, termasuk soal harga penawaran, juga dikemukakan pengamat migas Dr Kurtubi. Menurutnya, harga yang ditawarkan BP Indonesia bukan tidak mungkin diketahui Australia karena keberadaan BP di kedua belah pihak. "Siapa yang bisa membantah kalau North West mengetahui informasi harga dari BP Indonesia. Kita bisa berpikir begitu karena BP ada di dua tempat tersebut," tegas Kurtubi.

Kurtubi mensinyalir, BP nampaknya memang ingin memenangkan Australia karena meskipun sahamnya di konsorsium North West lebih kecil dibandingkan dengan sahamnya di Tangguh, namun kondisinya akan lebih cepat menghasilkan uang bila yang dimenangkan Australia.

"Sedangkan Tangguh masih memerlukan dana besar untuk membangun infrastrukturnya. Jadi, skenarionya memang BP sendiri ingin Australia memang karena alasan tadi," tambah Kurtubi.

Sementara itu Direktur Hulu Pertamina Iin Arifin Takhyan melihat kegagalan Indonesia meraih proyek LNG ke Guangdong, yang kemudian memperoleh proyek Fujian, lebih disebabkan karena Cina ingin *safe* (aman) dalam menjalankan proyek LNG pertama di negara Tirai Bambu tersebut. "Saya tidak melihat ada penyebab lain yang membuat Indonesia tidak bisa mendapatkan Guangdong. Bagi saya, Cina cuma ingin aman saja karena ini merupakan proyek pertama," kata Iin Arifin kepada *Buana*. □ sab

GUNTINGAN BERITA

| KODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------|
| Migas | Berita Buana | 6 | 14-8-2002 |

John Howard Kampanye Proyek Tangguh tak Aman

Jakarta, Buana

Indonesia jangan senang dulu memperoleh "hadiah hiburan" memasok gas alam cair (LNG) ke Fujian. Kali ini bukan masalah hitungan bisnis, tapi lebih pada manuver Australia untuk menunjukkan kepada Cina bahwa proyek LNG Tangguh tidak aman, sehingga hadiah hiburan itu pun bisa gagal pula.

Analisis itu dikemukakan mantan duta besar Indonesia untuk Australia, Sabam Siagian. Hal itu berkaitan dengan *psy war* (perang urat saraf) Perdana Menteri Australia John Howard. "Howard mau memberi kesan ke pemerintah Cina bahwa proyek LNG Tangguh di Papua tidak aman," tuturnya seperti dilansir portal berita *detikcom* di Jakarta, Selasa (13/8).

Hal itu disampaikan Sabam ketika diminta tanggapannya atas pertemuan John Howard dan PM Papua Nugini Michael Somare di Port Moresby, Selasa (13/8), yang salah satu agendanya adalah membicarakan kemerdekaan Papua Barat (Irian Jaya). Menurut Sabam, pemerintah Australia pimpinan John Howard saat ini memang sedang di atas angin, dan melakukan perang urat syaraf dengan Indonesia.

Sebab, Australia bersama BP Internasional baru saja memenangkan tender memasok LNG ke Guangdong Cina sebesar 3 juta ton/tahun selama 25 tahun. Sedangkan Indonesia bersama BP Indonesia hanya kebagian memasok LNG ke Provinsi Fujian, Cina sebanyak 2,5 juta ton/tahun. Proyek ini dinilai banyak orang seagai

hadiah hiburan karena sebelumnya Cina tidak pernah menyebut proyek tersebut.

"Jadi, apa yang dilakukan oleh Howard adalah demi kepentingan bisnis LNG yang memang bernilai besar. Howard ingin memberi kesan kepada pemerintah Cina bahwa Papua tidak aman," kata Sabam. Dengan demikian, Howard berharap proyek Tangguh di Papua yang akan memasok LNG ke Fujian bisa dibatalkan, dan Australia akan mengambil manfaatnya. "Dalam soal bisnis Howard memang lihai," katanya.

Menghadapai 'provokasi' Howard itu, kata Sabam, sebaiknya pemerintah Indonesia dan BP Indonesia (yang berpatungan dengan Pertamina untuk menggarap ladang gas Tangguh) kalem saja. "Saya baru saja dari Papua, tidak ada ge-

rakan separatisme yang mengancam stabilitas di sana," katanya.

Hanya saja, Sabam mengingatkan agar pemerintah mengatasi secara sungguh-sungguh masalah ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua. "Banyak kasus pelanggaran hak asasi yang tidak diselesaikan dengan baik, seperti kasus kematian Theys H Eluay itu. Ini yang menyebabkan ketidakpuasan rakyat Papua. Separatisme sendiri tidak ada," katanya.

Jika masalah pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan dibiarkan berlarut-larut, maka isu itu akan dipakai oleh siapapun untuk mengangkat masalah Papua (Irian jaya) di forum internasional. "Kali ini oleh Howard, kali yang lain bisa kelompok atau orang lain," katanya mengingatkan. □ sab

GUNTINGAN BERITA

| DE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|
| MIGAS | BUSNIS INDONESIA | 14 | 15-8-102 |

RI-Cina segera negosiasi harga LNG Fujian

JAKARTA (Bisnis): Indonesia dan Cina segera negosiasi harga pasokan LNG untuk Fujian sebelum kontrak resmi ditandatangani oleh kedua negara

Satya W. Yudha, *Vice President Government & Public Affairs* BP Indonesia, mengatakan bahwa tim dari Indonesia yang terdiri dari Ditjen Migas, Badan Pelaksana Migas, Pertamina, dan BP berangkat awal pekan depan ke Cina.

"Tim ini akan melakukan serangkaian pembicaraan dengan tim dari Cina menyangkut masalah penyesuaian harga dan bagaimana proses pasokan LNG tersebut dilakukan," tuturnya kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan harga yang diberikan oleh Cina tidak sama dengan yang ditawarkan Indonesia ketika mengikuti tender pasokan LNG untuk Guangdong karena jarak Fujian lebih jauh dibandingkan dengan Guangdong.

Satya menegaskan bahwa pemerintah jelas akan mengambil kesempatan yang diberikan Pemerintah Cina untuk memasok LNG ke Fujian.

Dia mengemukakan bahwa pasaran LNG di dunia sedang *oversupply* karena banyak negara yang berkeinginan untuk menjadi pemasok cadangan LNG di negara konsumen.

"Jadi mengapa Indonesia tidak mengambil kesempatan yang sudah ada di depan mata. Selain itu yang perlu diingat adalah Pemerintah Cina bukan menawarkan tapi memberikan kepada Indonesia untuk memasok gas di Fujian," ujarnya.

Dia mengatakan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Cina untuk memberikan pasokan gas Fujian kepada Indonesia sudah mempertimbangkan segala aspek termasuk juga keamanan.

Menurut dia, keputusan tersebut jelas melibatkan pejabat daerah di Fujian, terutama

gubernur. Dengan demikian, lanjutnya, keputusan tersebut diambil dengan persetujuan daerah.

Satya mengatakan Tim Indonesia ini mungkin akan melakukan pembicaraan tiga sampai empat kali sebelum kontrak resmi ditandatangani.

Menurut dia, pembicaraan ini lebih menguntungkan karena berbeda dengan Guangdong yang murni tender di mana pemenang mempunyai kewajiban melaksanakan kontrak langsung.

Tentukan harga

Namun demikian, katanya, dalam pasokan LNG ke Fujian ini Pemerintah Indonesia dapat melakukan serangkaian pembicaraan termasuk di dalamnya masalah harga sebelum ikatan hukum berupa kontrak ditandatangani.

Dia menambahkan dalam waktu dekat akan segera dibangun dua kilang LNG di Lapangan Tangguh, Papua yang masing-masing memiliki kapasitas sebesar 3 juta ton.

Saat ini, katanya, jumlah LNG yang dipasok dari Tangguh adalah sebanyak 3,8 juta ton dengan rincian permintaan dari Fujian 2,5 juta ton dan dari Filipina sebesar 1,3 juta ton.

Satya mengatakan dengan dibangunnya dua kilang LNG di Tangguh dengan jumlah kapasitas 6 juta ton tersebut, maka kelebihan gas akan dijual ke pasar Taiwan dan Cina.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan alasan BP menjadi garda depan untuk negosiasi dalam tender di Guangdong karena perusahaan minyak tersebut merupakan investor terbesar di Cina. Selain itu, lanjutnya, BP juga membangun kilang di Guangdong, sehingga diharapkan pemerintah Cina dapat lebih fleksibel.

Akan tetapi, lanjutnya, dalam pembicaraan yang lebih mendalam, BP sudah tidak menangani lagi tapi sudah diambil alih oleh Pemerintah. (04)

GUNTINGAN BERITA

| CODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|-----------------|
| MIGAS | DIALOG | 5 | 15 SEP 21 - '02 |

Bila Bagi Hasil tak Jelas, Kampar Tuntut Kelola CPP Block

(Pekanbaru, Dialog)- Kabupaten Kampar, Propinsi Riau sebagai salah satu pemegang saham, akan ke luar dari PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai pengelola CPP Block pasca peninggalan PT Caltex Pasific Indonesia (CPI), jika hitungan bagi hasil tak jelas.

Sikap kampar tersebut disampaikan Bupati Jefri Noer kepada wartawan, di sela-sela pembukaan Forum Koordinasi Konsultasi Pembangunan (FKKP) Propinsi Riau, di Ruang Hijau, Pekanbaru belum lama ini.

Sampai saat ini, kata Jefri, PT BSP belum pernah mengadakan sosialisasi ke daerahnya mengenai mekanisme, sistem manajemen, serta perhitungan bagi hasil yang akan diterima Kampar dari BSP.

"Padahal sebagai salah satu pemegang saham, kabupaten Kampar akan menanamkan sahamnya di PT BSP. Kalau semuanya serba tidak jelas, bagaimana Kampar akan berpartisipasi dalam PT BSP sebagai pengelolanya. Mungkin saja Kampar akan ke luar dari PT BSP dan menuntut pengelolaan sendiri atau bagi hasil sendiri

yang diambil dari PT Pertamina sesuai dengan porsi yang seharusnya diterima oleh daerah," kata Jefri.

Jefri sangat menyayangkan minimnya keterlibatan Kampar dalam pengambilalihan apalagi pengelolaan CPP Block. "Walaupun porsi Kampar dalam pengelolaan tersebut relatif kecil, akan tetapi aspirasi Kampar perlu didengarkan," ungkapnya. Sebagaimana telah diberitakan di beberapa surat kabar, PT BSP telah mengambil alih pengelolaan CPP Block dari PT CPI, terhitung sejak Selasa (6/8). Penandatanganan pengalihan tersebut dilakukan antara Dirut PT BSP Azali Johan, Ketua Badan Pelaksana (Kabalak) Migas Pertamina Rahmat Sudibyo, dan Direktur Hulu Pertamina Iin Arifin Tahiyon.

Sedangkan penyerahan CPP Block secara teknis dilakukan Jumat (9/9) pukul 00.00 WIB, di kawasan Zamrud, Buatan, Kabupaten Siak. Walaupun telah diserahkan pengelolannya ke PT BSP, namun persoalan belum tuntas sepenuhnya. Pihak Pemprov Riau masih keberatan dengan kecilnya porsi bagi hasil yang akan mereka terima. (RS)

GUNTINGAN BERITA

| DE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|--------|--------------------------------------|---------|-----------|
| Migas | Suara Pembangunan | 7 | 14-8-2002 |

Cadangan Mencapai 500 Juta Barel

Exxon Ingin Perpanjangan Kontrak Cepu

JAKARTA - Ladang minyak Cepu yang kini dikelola Mobil Cepu Ltd (anak perusahaan ExxonMobil Oil Corp) diperkirakan menyimpan cadangan hingga 500 juta barel. Karena besarnya cadangan, tak heran bila sampai saat ini masih terjadi tarik-menarik yang cukup kuat antara pemerintah dengan Pertamina dan manajemen perusahaan, memperdebatkan nasib ladang itu.

Sedikitnya, ada tiga masalah yang menjadi topik pembicaraan. Pertama, perusahaan yang berbasis di Amerika itu ngotot mendapatkan perpanjangan kontrak sampai tahun 2030. Kata mereka, kalau kontrak harus diakhiri pada 2010 seperti yang tertera dalam kontrak, proyek tidak akan ekonomis. Hal lainnya, menyangkut nasib investasi ExxonMobil serta permintaan Pertamina agar mendapatkan saham pada operasi perusahaan.

Supaya mendapatkan titik temu perbedaan pendapat, pada Selasa (13/8) siang, Exxon mengutus wakilnya HJ Longwell, Executive Director and VP ExxonMobil Oil Corp dari Dallas AS dan General Manajer ExxonMobil Oil Indonesia RI Wilson, bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro dan Direktur Pertamina Iin Arifin Takhyan, serta Ketua Badan Pelaksana Migas Rachmat Sudibyo. Pertemuan ini digelar karena negosiasi dengan Pertamina yang berjalan hampir setahun, tidak menghasilkan satu keputusan.

Usai pertemuan, Rachmat mengatakan, pertemuan itu belum menyelesaikan masalah, jadi akan dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) hari ini (Rabu, 14/8). "Besok, DKPP akan bersidang membicarakan masalah ini. Jadi, pertemuan tadi belum menghasilkan keputusan akhir," kata Rachmat singkat.

Para petinggi ExxonMobil enggan berkomentar. Juru bicara ExxonMobil Indonesia Deva Rachman mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan perpanjangan kontrak.

Yang jelas, tanpa perpanjangan, investasi yang telah ditanamnya sekitar US\$ 300 juta ketika melakukan eksplorasi kawasan itu, tidak akan kembali. "Karena itu, dalam pertemuan ini kami ingin ketegasan sikap pemerintah," katanya.

Pejabat Sementara Dirjen Migas, Departemen ESDM, Kardaya Warnika mengatakan, pada sidang yang akan dilakukan hari ini, DKPP akan mengkaji apa keuntungan yang akan diperoleh negara bila perpanjangan dilakukan atau tidak dilakukan. "Tentunya, secara teori, mana yang akan memberi keuntungan maksimal bagi negara, itulah yang akan diputuskan," tambahnya.

Karena belum ada kepastian apa pun mengenai masalah yang terganjal, sejak Januari 2002 ExxonMobil Oil Cepu untuk sementara menghentikan kegiatannya di lapangan. Deva mengatakan, belum bisa

memberi keterangan langkah apa yang akan dilakukan perusahaannya bila perpanjangan tidak diberikan.

Akibat penghentian kegiatan ini, dipastikan rencana produksi ladang minyak yang semula diperkirakan akan dimulai pada kuartal pertama 2003, tidak akan terrealisasi. "Itu sudah pasti. Jadwal baru bergantung pada hasil negosiasi," tambahnya.

Tahun lalu, ExxonMobil Oil Cepu mengumumkan menemukan cadangan sekitar 250 juta barel pada Sumur Banyu Urip III yang sudah dibornya. Penemuan ini merupakan penemuan cukup penting dalam sejarah perminyakan Indonesia selama periode terakhir.

Dari temuan itu, mereka memprediksi pada tahap awal akan memulai produksi 100.000 barel per hari. Selain Banyu Urip III, masih ada empat sumur lain yang akan dieksplorasi.

Namun, hasil studi Lemigas menyebutkan, cadangan di ladang TAC itu baru diperkirakan mencapai 500 juta barel. "Ini adalah hasil studi Lemigas yang belum final. Kebenarannya tentu 50 persen, sebab belum dilakukan pengeboran," kata Kardaya Warnika. (K-10)

GUNTINGAN BERITA

| ODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|---------|--------------------------------------|---------|----------|
| MIGAS | BISNIS IND. | 14 | 15-8-'02 |

HK beli sepertiga gas Cina

BEIJING (Antara): Hong Kong bisa membeli sepertiga gas LNG yang dipasok ke Cina Selatan oleh sebuah konsorsium Australia sesuai persetujuan.

Menurut *China Daily*, Hong Kong diperkirakan menggunakan jutaan ton LNG per tahun dari terminal pertama LNG Cina yang akan dibangun di provinsi Guangdong, sementara sisanya, dua pertiga dari stok gas LNG itu akan digunakan di sebagian besar wilayah provinsi bagian Selatan Cina.

Mark Qiu, Kabag Keuangan China National Offshore Oil Co. (CNOOC), mengatakan sebuah konsorsium di bawah pimpinan perusahaan energi raksasa Australia, Woodside Petroleum Ltd dipilih untuk jangka waktu 25 tahun untuk memasok gas ke Cina.

Mark Qiu tidak menjelaskan berapa banyak gas LNG yang akan dipasok ke terminal LNG Hong Kong, terutama setelah terminal itu meningkatkan produksinya dari tiga juta ton menjadi lima juta ton setahun terhitung tahun 2008.

Diungkapkan, dua perusahaan pembangkit energi Hong Kong, Towngas dan Hong Kong China Light & Power, masing-masing menguasai tiga persen saham terminal gas LNG.

GUNTINGAN BERITA

| KODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|---------|
| MIGAS | THE JAK. POST | 14 | 15-8-02 |

Oil prices jumps 2% to multi-week highs

Reuters
Singapore

Oil prices jumped almost two percent to a 13-week peak on Wednesday as U.S. fuel supplies fell heavily across the board, leaving spare supplies of crude in the world's biggest consumer at the lowest level since March 2001.

U.S. light crude futures stood 45 cents higher at US\$28.35 a barrel after earlier touching a 13-week high of \$28.49. In London, benchmark Brent futures opened 44 cents firmer at \$26.59.

Figures released by the American Petroleum Institute (API) showed crude inventories in the United States tumbling 9.5 million barrels to 295.65 million, a level not seen since early last year.

The fall by far outpaced analysts' expectations of a 1.2 million barrel decline for the week to Aug. 9.

Also pushing up prices, the API recorded lower stocks of gasoline — the seasonal barometer for overall oil demand in the summer — and a surprise contra-seasonal decrease in distillate stocks.

Distillates include heating

oil stocks, which usually increase at this time of year ahead of winter in the northern Hemisphere.

The API said gasoline tanks dropped 3.86 million barrels to just under 209 million barrels as U.S. drivers soaked up a hefty 9.73 million barrels per day (bpd) of motor fuel.

Analysts had predicted gasoline supplies to fall by 1.5 million barrels.

Distillates were down by 1.5 million barrels to 133 million barrels, bringing the year-on-year surplus to 11.9 million barrels, the API said.

The fall in refined product

supplies came despite U.S. refiners turning up production taps by 1.2 percentage points to about 94.5 percent of capacity.

"This is the most bullish report all year," said Peter Beutel, analyst at Cameron Hanover in Connecticut. "Just looking at the product draws, you say this is a supportive report. Then you look at the crude oil figure and it's truly shocking."

Oil products futures also rose on the back of the API numbers, which were released after the close of regular trading in New York on Tuesday.

GUNTINGAN BERITA

| ODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|---------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 11098 | Juara Pembinaan | 7 | 14-8-2002 |

Dephub Usulkan BBM Dikenakan Pajak

Pajak Menekan Esaran Tarif Angkutan Umum

JAKARTA - Departemen Perhubungan (Dephub) mengusulkan bahan bakar minyak (BBM) dikenakan pajak. Pajak tersebut akan digunakan untuk subsidi angkutan perkotaan.

Demikian disampaikan Kepala Perhubungan Darat, Dephub, Iskandar Abubakar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Iskandar, kondisi angkutan umum saat ini sudah buruk, untuk memper-

baikinya perlu membenahi infrastruktur dan sarana angkutan umum. "Tetapi, masalahnya pemerintah sekarang tidak punya dana. Jika tidak memiliki dana, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik?" tukas dia.

Karena itu, langkah yang akan diambil yakni dengan menetapkan pajak pada BBM. Terutama bagi kalangan kelas menengah ke atas. "Melalui pajak BBM ini yang paling mudah dilakukan. Subsidi dari pajak itu nantinya untuk angkutan masal bagi menengah ke bawah. Artinya besaran tarif dapat ditekan," kata dia.

Dia menambahkan, banyak negara sudah mengenakan pajak BBM. Sementara Indonesia masih disubsidi.

"Jadi sudah waktunya menarik pajak dari BBM," kata dia.

Iskandar mencontohkan, di India harga BBM sudah tinggi yakni US\$ 0,5 per liter. Sementara harga BBM di Indonesia masih berkisar US\$ 0,2/liter. Menurutnya pemberlakuan pajak BBM itu baru dapat dilakukan setelah 2004.

Persentase

Mengenai berapa besar persentase pajak BBM yang akan dikenakan, Iskandar belum dapat menjelaskan. "Bergantung pada berapa kebutuhan dananya nanti. Yang jelas, hal ini akan dilakukan bertahap. Dan saat ini masih dalam tahap pengkajian," kata dia.

Iskandar mengakui, usul-

an itu tidak jauh beda dengan usulan *road fund* yang dilon-tarkan Departemen Permu-kiman dan Prasarana Wila-yah (Depkimpraswil). Namun *road fund* versi Depkimpraswil itu hanya untuk membiayai infrastrukturnya saja. "Se-dangkan kami inginnya sub-sidi juga diberikan ke angku-tan umum," tukas dia.

Beberapa waktu lalu, Menkimpraswil Soenarno me-nyatakan, konsep *road fund* adalah konsep pembiayaan pemeliharaan jalan dan pe-ngelolaan suatu jaringan ja-lan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam konsep tersebut, masyarakat diajak menge-tahui permasalahan yang di-hadapi dalam pengelolaan jalan, sehingga diharapkan

mereka lebih peduli dan ber-tanggung jawab, serta mem-berikan dukungan dalam pembiayaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan.

Keikutsertaan masyara-kat bisa dilakukan dalam be-berapa alternatif, seperti me-lalui pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, serta suku cadang kendaraan bermotor. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh sebuah badan yang disebut *road board*. Ke-giatan badan ini harus men-dapat dukungan Undang-un-dang dan Peraturan Peme-rintah (PP)

"Esensinya, pajak yang dipungut dari berbagai ke-giatan yang menggunakan jalan harus dikembalikan lagi untuk pemeliharaan jalan," kata Soenarno. (A-16/Y-4)

GUNTINGAN BERITA

| ODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|---------|--------------------------------------|---------|-----------|
| MIGAS | RAKYAT MERDEKA | 4 | 15-8-2002 |

Waspada! SPBU Curang di Bekasi

PARA pengendara sepeda motor maupun mobil kerap mendapat perlakuan curang dari oknum petugas pengisian BBM di beberapa SPBU wilayah Bekasi.

Oknum petugas biasanya ngemplang antara Rp 80 hingga Rp 90 dari pengendara sepeda motor untuk setiap pengisian BBM. Dan untuk pengendara mobil biasanya dikemplang lebih besar.

Modus operandi mereka adalah dengan mematikan mesin pengisi BBM saat instrumen penunjuk harga mendekati angka (jumlah) yang diminta pengendara sebelumnya.

Nilai Rp 80 hingga Rp 90 untuk kondisi sekarang memang relatif kecil. Namun bila dikalkulasikan akan menghasilkan angka yang cukup fantastis. Dengan asumsi paling sederhana apabila setiap hari ada seribu orang yang mengisi BBM, berarti nilai rupiah yang dikemplang sebesar Rp 80.000 hingga Rp 90.000 per hari dan menjadi Rp 2.400.000 hingga Rp 2.700.000 per bulan.

Meski telah merampok hak konsumen, tetapi sikap oknum tersebut terkesan arogan saat dikomplain pengendara yang merasa dirugikan. "Kalau tidak senang, ngisi saja di tempat lain," jawab oknum petugas dengan rasa tidak bersalah sedikitpun. Padahal seharusnya oknum petugas bersikap profesional.

Sejumlah warga kepada *DPR Merdeka* berharap pihak terkait seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Direktorat Perlindungan Konsumen Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Pertamina dan khususnya polisi segera turun tangan. Sebab tindakan oknum petugas SPBU ini bisa dikategorikan perbuatan kriminal lantaran memanipulasi hak pengendara yang mengisi BBM di siang bolong.

■ Agus Suyitno - Bekasi

GUNTINGAN BERITA

| CODE DOK | HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA | HALAMAN | TANGGAL |
|----------|--------------------------------------|---------|---------------|
| MIGAS | BISNIS INDONESIA | 7 | 15 - 8 - 2002 |

OPEC tak perlonggar kuota minyak

JAKARTA (Bisnis): Sekjen OPEC Alvaro Silva kemarin membantah pernyataan bahwa kartel minyak tersebut akan memperlonggar kuota produksi yang ketat pada triwulan keempat 2002 dan menyatakan isu tersebut akan diputuskan pada satu pertemuan bulan depan.

Ketika ditanya tentang kemungkinan peningkatan batas produksi OPEC, Silva mengatakan: "Kami tidak berbicara tentang peningkatan. Soal ini akan didikaji dalam pertemuan nanti."

Sejumlah delegasi senior OPEC memperkirakan akan OPEC akan meningkatkan produksinya guna memenuhi pemulihan permintaan setelah terjadi resesi pada tahun lalu.

Silva mengatakan inventori minyak global akan menjadi faktor penting dalam keputusan yang akan diambil pada pertemuan soal kebijakan pada 19 September di Jepang. (jao)